



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

UNIT KERJA : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ANDRIA SHAHPUTRA**
2. Jabatan : **KEPALA BADAN**
3. NHK : **966142**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.173.055.000**

1. Tanah Seluas 499 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. Tanah Seluas 5.353 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 187.355.000
3. Tanah Seluas 2.200 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, Rp. 137.500.000
4. Tanah Seluas 6.000 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, Rp. 225.000.000
5. Tanah Seluas 96 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 163.200.000
6. Tanah Seluas 2.000 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
7. Tanah Seluas 2.051 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
8. Tanah Seluas 8.050 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 215.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA YARIS 1.5 S CVT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 215.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. ----**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.321.737.978
F. HARTA LAINNYA	Rp.	575.000.000
Sub Total	Rp.	3.284.792.978
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.284.792.978

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.